
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2021

Nur Ayu Handayani*, Muzdalifah

Program Studi Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat

*E-mail: nrayuhandayani44@gmail.com

Abstract

This research was conducted to determine the effect of Local Own Revenue and balancing funds on financial performance in terms of the ratio of operating activities and how the financial performance of local governments when viewed from the analysis of financial ratios. This study uses descriptive analysis, classical assumption test, and multiple linear regression analysis. The results of the study show that regional original income has no significant effect on financial performance, while balancing funds have a significant negative effect on financial performance. When viewed from the analysis of financial ratios, the financial performance of local governments is not good enough because most of the financial ratios still tend to be in the low category, meaning that local governments are still unable to reduce the level of dependence on financial assistance from the central government.

Keywords: *Local Own Revenue; Balancing Funds; Governments Financial Performance*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan ditinjau dari rasio aktivitas operasi dan bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah jika dilihat dari analisis rasio keuangan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Jika dilihat dari analisis rasio keuangan, kinerja keuangan pemerintah daerahnya belum cukup baik karena sebagian besar rasio keuangan masih cenderung berada pada kategori rendah artinya pemerintah daerah masih belum mampu mengurangi tingkat ketergantungan terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah; Dana Perimbangan; Kinerja Keuangan Pemerintah

PENDAHULUAN

Negara kesatuan Indonesia terdiri dari beberapa daerah, antara lain pulau, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Sistem politik Indonesia mengalami perubahan yang signifikan akibat diberlakukannya otonomi daerah sejak tahun 1999 melalui UU No. 22 Tahun 1999, yang kemudian digantikan oleh UU No. 32 Tahun 2004 dan direvisi menjadi UU No. 23 Tahun 2014. peraturan perundang-undangan memberikan kepada semua daerah Indonesia (provinsi, kabupaten, atau kota) kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri serta kepentingan penduduk setempat.

Tuntutan akan demokrasi yang lebih besar disertai dengan perubahan di sektor publik telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Semua aspek pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan negara dan daerah, harus lebih akuntabel dan transparan agar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik. Fakta yang ditemukan di lapangan menunjukkan tidak semua daerah bisa mandiri dan terpisah dari pemerintah pusat, hal ini dikarenakan bahwa kebijakan pelaksanaan pemerintah masih berada di dalam pengelolaan pemerintah pusat. Dalam kerangka APBD, dana perimbangan berperan penting sebagai sumber pendapatan

daerah selain PAD. Tujuan transfer atau dana perimbangan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menerapkan otonomi daerah. Dengan desentralisasi pemerintahan, otonomi daerah memberikan kekuasaan dan yurisdiksi pemerintahan yang sah kepada daerah undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian digantikan oleh Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah “dapat mengelola keuangan dan mengambil keputusan sendiri, sehingga nantinya diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah” (Nawal & Yunani, 2023).

Menurut Mardiasmo (2009), pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada di masing-masing daerah merupakan salah satu dari dua manfaat nyata desentralisasi secara teoritis. Yang lainnya adalah dapat membantu alokasi sumber daya dengan mengalihkan peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan paling bawah yang memiliki informasi lengkap.

Menurut Rosemary et al (2016), apabila pemerintah pusat tidak mampu secara mandiri mengendalikan pemekaran wilayahnya secara keseluruhan, maka pemerintah daerah harus diberi kekuasaan untuk menguasai dan mengurus pemerintahannya sendiri. Agar pemerintah daerah dapat mengelola APBD dengan lebih mandiri dan agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih cepat tanpa harus menunggu dana dari pusat, maka pemerintah pusat melaksanakan kebijakan otonomi daerah. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah kota.

Kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan sejauh mana hasil kerja bidang keuangan daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan melalui kebijakan atau ketentuan peraturan perundang-undangan untuk periode tertentu. Dengan rencana anggaran yang baru disahkan, pemerintah harus dapat berfungsi seefektif mungkin. Menurut Mokodompit et al (2014), kinerja dapat dipahami sebagai hasil yang dapat dievaluasi sesuai dengan standar yang berlaku untuk jangka waktu tertentu sebagai bagian dari ruang lingkup pekerjaan. Hanya ketika individu atau kelompok individu memiliki kriteria keberhasilan yang telah ditentukan sebelumnya, kinerja dapat diketahui.

Realitasnya, laporan keuangan daerah menghadapi sejumlah tantangan karena kekurangan sumber daya manusia, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Halim (2004) mengemukakan pada era otonomi saat ini, daerah diharapkan mampu mencari sumber pembiayaan pembangunan lain dan mengelola dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi tanpa mengurangi harapan bantuan dari pemerintah pusat. Memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah tidak berarti pemerintah federal menjadi tidak aktif; salah satu cara pemerintah pusat berpartisipasi dalam desentralisasi adalah melalui dana perimbangan APBD.

Strategi pelaksanaan kebijakan akan dinilai berjalan optimal apabila realisasi anggarannya mampu mencapai *output* dan *outcomes* yang ditargetkan. Dengan meningkatkan kapasitasnya dalam menghasilkan uang, pemerintah daerah yang merupakan pemain kunci dalam pengelolaan keuangan daerah dapat mengurangi penurunan pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahunnya. PAD di setiap daerah selalu mengalami peningkatan walaupun dengan tren yang berfluktuasi. PAD tertinggi diperoleh kota Banjarmasin lalu disusul oleh kota Banjarbaru hal ini disebabkan karena dua daerah ini merupakan daerah pusat aktivitas perekonomian di Kalimantan Selatan sehingga realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerahnya cukup tinggi sedangkan pendapatan terendah berada di Kabupaten Balangan dikarenakan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerahnya relatif rendah (Hapsa & Saipudin, 2019).

“Selain PAD, pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sehingga pemerintah daerah sudah

seharusnya mempunyai sumber dana yang cukup. Sumber dana tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pinjaman daerah. Sumber dana tersebut langsung dikelola oleh pemerintah daerah melalui APBD dan bekerja sama dengan pemerintah pusat” (Mustafa & Halim, 2009).

Suatu daerah dapat dikatakan berhasil apabila pemerintah daerahnya mampu mendorong pertumbuhan pendapatan daerah secara signifikan setiap tahunnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan harus berfungsi secara efektif sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah guna meningkatkan pendapatan daerah, namun kenyataannya pemerintah daerah masih bergantung terhadap dana bantuan dari pusat, hal ini dapat dilihat dari laporan dana perimbangan yang hampir selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Identifikasi potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah, khususnya aliran pendapatan dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah, merupakan salah satu strategi untuk mengoptimalkan PAD. Pemerintah daerah harus bekerja untuk lebih meningkatkan pendapatan daerah mereka sendiri karena lebih banyak kekuasaan ditransfer dari pemerintah pusat ke daerah. Penulis mengangkat judul berdasarkan penjelasan latar belakang, menggunakan referensi ke studi sebelumnya untuk menyediakan literatur baru dan mengumpulkan bukti empiris pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012-2021.

PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian oleh Ratma Budiana (2021), yang berjudul Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (studi kasus pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia tahun 2020) menunjukkan hasil bahwa semua variabel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah namun secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis menggunakan regresi linier berganda, untuk teknik pengambilan sampelnya secara *purposive sampling* dengan cara mengambil laporan keuangan seluruh provinsi yang ada di Indonesia dalam kurun waktu satu tahun. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan deskriptif dengan melihat hasil dari analisis rasio keuangan yang datanya diambil dari laporan keuangan seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu sepuluh tahun.

Penelitian oleh Dessy Riani (2022), yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, *Leverage*, ukuran Pemerintahan, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi Sumatera Utara menunjukkan hasil bahwasanya secara simultan semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, secara parsial variabel PAD, *leverage*, dan dana perimbangan berpengaruh positif dan variabel ukuran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif dengan variabel independen yang digunakan terdiri dari PAD, dana perimbangan, *leverage* dan ukuran pemerintah. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu terdapat pada jumlah variabel yang digunakan, pada penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen yaitu PAD dan dana perimbangan.

Penelitian oleh Kornelis Kopong Bolen (2019), yang berjudul *The effect of Financial Performance and Balanced Funds on Capital Expenditure of Local Government in District/City in Indonesia* menunjukkan hasil bahwa tidak semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Kinerja keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap belanja modal sedangkan efektivitas keuangan, DBH, dan DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal, variabel efisiensi keuangan daerah dan DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pada penelitian terdahulu menggunakan teori desentralisasi fiskal,

metode yang digunakan ialah metode kuantitatif dengan alat analisis Eviews 9. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh Kornelis Kopong Bolen menggunakan *capital expenditure* dan variabel independennya antara lain pendapatan asli daerah, efektivitas keuangan daerah, efisiensi keuangan daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori penerimaan pemerintah, dengan metode kuantitatif menggunakan alat analisis SPSS 26. Selain itu pada penelitian ini menggunakan kinerja keuangan sebagai variabel dependen dan untuk variabel independennya hanya menggunakan dua variabel saja yaitu PAD dan dana perimbangan.

Penelitian oleh Mulia Andirfa (2016), yang berjudul Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh menunjukkan hasil bahwa belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, namun hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah dan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah sedangkan pendapatan asli daerah tidak mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Pada penelitian terdahulu menggunakan metode analisis kuantitatif dengan meregresi seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh selama tiga tahun dengan menggunakan variabel belanja modal sebagai variabel dependen dan variabel independennya menggunakan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada variabel dependennya, penelitian ini menggunakan kinerja keuangan sebagai variabel dependen selain itu perbedaan yang lain terletak pada jumlah populasi penelitian. Pada penelitian ini jumlah populasi penelitian sebanyak 140 sampel.

Penelitian yang dilakukan oleh Tri Andjarwati (2021), yang berjudul *Analysis of Local Own Revenue and Balancing Funds on The Financial Performance of District and Cities in The Region of East Java Province* menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Yang berarti adanya peningkatan PAD tidak mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan dana perimbangan yang berpengaruh negatif artinya setiap peningkatan dana perimbangan menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pada penelitian terdahulu menggunakan teori belanja daerah dengan metode analisis regresi linier berganda menggunakan PLS (*Partial Least Square*) dengan alat analisis M3 PLS. Perbedaannya dengan penelitian ini terdapat pada teori yang digunakan dan alat analisisnya, teori yang digunakan pada penelitian ini ialah penerimaan daerah dan menggunakan SPSS 26 sebagai alat analisisnya.

METODE

Jenis pada riset ini ialah kuantitatif dan deskriptif, lokasi risetnya ialah di seluruh wilayah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan dengan mengunjungi situs web Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. Teknik analisis data pada riset ini ialah regresi data panel (kombinasi dari *time series* dan *cross section*) dan statistik deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui kenormalan distribusi data dan residual model regresi yang dilihat dari nilai prob $> 0,05$ maka distribusi data normal jika $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi normal.

Tabel 1

Hasil Uji Normalitas	
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200 ^{c,d}

Sumber: *Output SPSS 26*, data diolah.

Dari tabel di atas, dilihat dari nilai signifikansi *Kolmogrov-Smirnov* yaitu sebesar 0,200 > 0,05 hal ini menunjukkan data terdistribusi dengan normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui variabel dalam data terjadi masalah korelasi antara masing-masing variabel atau tidak.

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
PAD	0,724	1,382	Tidak terjadi multikolinearitas
DP	0,724	1,382	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: *Output SPSS 26*, data diolah.

Dari tabel di atas, nilai VIF untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan adalah $1,382 < 10,0$ dan nilai *tolerance value* $0,724 > 0,10$. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas pada kedua variabel tersebut.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi antar residual dari sebuah analisis regresi.

Tabel 3
Uji Autokorelasi Durbin Watson

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,330 ^a	0,109	0,095	0,5413	1,983

Sumber: *Output SPSS 26*, data diolah.

Diketahui dari tabel di atas nilai *durbin watson* sebesar 1,983, nilai tersebut lebih besar dari dU (1,7449) dan lebih kecil dari $4 - dU$ (2,2551) maka berdasarkan kriteria pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi melalui *durbin watson* yaitu $dU < d < 4 - dU$ dapat disimpulkan hipotesis nol diterima dan tidak terdapat gejala autokorelasi pada penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji perbedaan varians dan residual dalam model regresi antara pengamatan lainnya. Jika nilai sig > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas sedangkan jika < 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Nilai Signifikansi	Keterangan
PAD	0,414	Tidak terjadi heteroskedastisitas
DP	0,217	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: *Output SPSS 26*, data diolah.

Berdasarkan tabel di atas koefisien variabel independen tidak signifikan karena lebih dari 0,05, nilai sig untuk variabel pendapatan asli daerah adalah $0,414 > 0,05$ dan nilai sig untuk

variabel dana perimbangan adalah $0,217 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui data hasil estimasi regresi linier berganda untuk memahami pengaruh PAD dana dana perimbangan terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan program SPSS 26.

Tabel 5
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

		Unstandardized		Standardized			
		Coefficients		Coefficients		T	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	0,100	0,018			5,510	0,000
	PAD	1,309E-10	0,000	0,107		1,236	0,219
	DP	-1,428E-10	0,000	-0,341		-3,919	0,000

Sumber: *Output* SPSS 26, data diolah.

Berdasarkan tabel di atas, persamaan regresi linier berganda pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 0,100 + 0,0000000001309 - 0,0000000001428 + e$$

Hasil persamaan regresi di atas bisa dipahami dengan:

Nilai koefisien β_0 sebesar 0,100 jika variabel PAD (X1) dan dana perimbangan (X2) = 0 maka kinerja keuangannya 0,100. Nilai koefisien $\beta_1 = 0,0000000001309$ artinya setiap kenaikan PAD dalam satu satuan maka akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Nilai variabel dana perimbangan pada tabel di atas memiliki nilai koefisien sebesar -0,0000000001428 artinya setiap peningkatan dana perimbangan dalam satu satuan maka variabel kinerja keuangan akan mengalami penurunan.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t-Statistik)

Uji t digunakan untuk melihat bagaimana variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

Tabel 6
Hasil Uji t-Statistik

		Hatchery Effect Statistics					
Model		Unstandardized		Standardized		T	Sig.
		Coefficients		Coefficients			
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	0,100	0,018			5,510	0,000
	PAD	1,309E-10	0,000	0,107		1,236	0,219
	DP	-1,428E-10	0,000	-0,341		-3,919	0,000

Sumber: *Output* SPSS 26, data diolah.

Untuk pengujian hipotesis pertama berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas variabel PAD memiliki nilai koefisien sebesar 0,0000000001309 dan nilai signifikansi $0,219 > \alpha = 0,05$, artinya H_0 diterima H_1 ditolak. Maka variabel PAD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara itu nilai t-hitung Pendapatan Asli Daerah mencapai $1,236 < t\text{-tabel } 1,657$ maka artinya hipotesis ditolak. Untuk pengujian hipotesis yang kedua berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas variabel dana perimbangan memiliki nilai koefisien sebesar -0,0000000001428 dan nilai signifikansi $0,000 < \alpha = 0,05$, artinya H_0 ditolak H_1 diterima. Maka variabel dana perimbangan berpengaruh secara negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara itu nilai t-hitung dana perimbangan sebesar $3,919 > t\text{-tabel } 1,657$ maka hipotesis diterima.

Uji Simultan (Uji F-statistik)

Uji F digunakan untuk menunjukkan seluruh variabel bebas dalam model regresi dengan nilai sig < 0,05 berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Tabel 7
Hasil Uji F-Statistik

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,045	2	0,023	7,712	0,001 ^b
	Residual	0,369	126	0,003		
	Total	0,414	128			

Sumber: *Output* SPSS 26, data diolah.

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi dalam pengujian secara simultan memiliki nilai *Sig* 0,001 < 0,05 artinya H0 ditolak dan H1 diterima maka artinya persamaan regresi dalam penelitian layak dan dapat digunakan untuk analisis berikutnya.. Sedangkan nilai F-hitung yang diperoleh sebesar 7,712 dan F-tabel dengan melihat tabel F diperoleh nilai sebesar 3,07. Dengan demikian F-hitung > F-tabel Maka dapat disimpulkan bahwa variabel PAD dan dana perimbangan secara bersama sama (simultan) memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk melihat kekuatan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.

Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,825 ^a	0,681	0,676	115442391,587

Sumber: *Output* SPSS 26, data diolah.

Berdasarkan tabel di atas, Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan mampu mempengaruhi faktor kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 68,1%, menurut nilai *R square* sebesar 0,681, sedangkan variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini menyumbang sisa 31,9% dari varians.

Analisis Rasio Keuangan

Rasio Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal adalah ukuran kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah. Berdasarkan ukuran tersebut maka dapat diketahui besaran kemampuan penghimpunan dana yang berasal dari daerah itu sendiri.

Tabel 9
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, 2012-2021

Kabupaten/Kota	DF (%)	Kategori
Tanah Laut	4,87	Sangat kurang
Kotabaru	8,12	Sangat kurang
Banjar	8,91	Sangat kurang
Barito Kuala	3,69	Sangat kurang
Tapin	4,48	Sangat kurang
Hulu Sungai Selatan	7,37	Sangat kurang
Hulu Sungai Tengah	8,09	Sangat kurang
Hulu Sungai Utara	6,11	Sangat kurang
Tabalong	8,76	Sangat kurang
Tanah Bumbu	6,77	Sangat kurang
Balangan	3,91	Sangat kurang
Banjarmasin	14,00	Kurang

Kabupaten/Kota	DF (%)	Kategori
Banjarbaru	12,58	Kurang

Sumber: Data diolah.

Berdasarkan tabel di atas dari 13 Kabupaten dan Kota dalam kurun waktu 10 tahun hampir 90% rasio fiskal secara rata-rata berada pada kategori sangat kurang dan 10% sisanya berada pada kategori kurang. Daerah dengan kategori sangat kurang yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kotabaru, Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Tanah Bumbu, dan Balangan. Sedangkan daerah yang termasuk ke dalam kriteria kurang terdapat pada kota Banjarmasin dan Banjarbaru.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah untuk menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi.

Tabel 10
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, 2012-2021

Kabupaten/Kota	Kemandirian Keuangan (%)	Kategori
Tanah Laut	12,14	Rendah sekali
Kotabaru	11,03	Rendah sekali
Banjar	14,90	Rendah sekali
Barito Kuala	5,62	Rendah sekali
Tapin	6,86	Rendah sekali
Hulu Sungai Selatan	14,00	Rendah sekali
Hulu Sungai Tengah	12,01	Rendah sekali
Hulu Sungai Utara	13,20	Rendah sekali
Tabalong	14,22	Rendah sekali
Tanah Bumbu	11,93	Rendah sekali
Balangan	6,47	Rendah sekali
Banjarmasin	24,86	Rendah
Banjarbaru	22,43	Rendah

Sumber: Data diolah.

Berdasarkan tabel di atas hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah 13 Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 10 tahun secara rata-rata menunjukkan berada pada 2 kategori yaitu rendah sekali dan rendah. Kabupaten yang berada dalam kriteria rendah sekali kemandirian keuangan daerahnya yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kotabaru, Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Tanah Bumbu, dan Balangan. Sedangkan daerah yang termasuk ke dalam kriteria kemandirian keuangan rendah terdapat pada daerah perkotaan yaitu Kota Banjarmasin dan Banjarbaru karena rasio rata-ratanya lebih dari 20%.

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas untuk menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Tabel 11
Rasio Efektivitas Keuangan Daerah
Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, 2012-2021

Kabupaten/Kota	Efektivitas (%)	Kategori
Tanah Laut	88,17	Cukup efektif
Kotabaru	115,31	Sangat efektif
Banjar	102,50	Sangat efektif
Barito Kuala	78,64	Kurang efektif
Tapin	87,95	Cukup efektif
Hulu Sungai Selatan	98,55	Efektif
Hulu Sungai Tengah	116,75	Sangat efektif
Hulu Sungai Utara	95,11	Efektif
Tabalong	115,58	Sangat efektif

Kabupaten/Kota	Efektivitas (%)	Kategori
Tanah Bumbu	95,16	Efektif
Balangan	81,89	Cukup efektif
Banjarmasin	122,79	Sangat efektif
Banjarbaru	98,45	Efektif

Sumber: Data diolah.

Berdasarkan tabel di atas hasil perhitungan rasio efektivitas menunjukkan hasil ada 5 daerah yang masuk ke dalam kriteria sangat efektif yaitu Kabupaten Kotabaru, Banjar, Hulu Sungai Tengah, Tabalong dan Kota Banjarmasin, 4 daerah lain yang masuk ke dalam kriteria efektif yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Tanah Bumbu dan Kota Banjarbaru, 3 daerah lain yaitu Kabupaten Tanah Laut, Tapin, dan Balangan masuk ke dalam kriteria cukup efektif dan yang terakhir 1 daerah yaitu Kabupaten Barito Kuala masuk ke dalam kriteria kurang efektif.

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menunjukkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Tabel 12
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, 2012-2021

Kabupaten/Kota	Efisiensi (%)	Kategori
Tanah Laut	71,06	Efisien
Kotabaru	109,97	Tidak efisien
Banjar	90,03	Kurang efisien
Barito Kuala	87,81	Cukup efisien
Tapin	98,96	Kurang efisien
Hulu Sungai Selatan	81,21	Cukup efisien
Hulu Sungai Tengah	104,10	Tidak efisien
Hulu Sungai Utara	80,65	Cukup efisien
Tabalong	96,01	Kurang efisien
Tanah Bumbu	96,30	Kurang efisien
Balangan	87,38	Cukup efisien
Banjarmasin	95,80	Kurang efisien
Banjarbaru	87,21	Cukup efisien

Sumber: Data diolah.

Tabel di atas menunjukkan secara rata-rata rasio efisiensi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa terdapat 1 daerah berada pada kriteria efisien yaitu Kabupaten Tanah Laut, sedangkan 5 daerah yang termasuk ke dalam kriteria cukup efisien berada pada Kabupaten Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Balangan dan Kota Banjarbaru. 5 daerah yang termasuk ke dalam kriteria kurang efisien berada pada Kabupaten Banjar, Tapin, Tabalong, Tanah Bumbu dan Kota Banjarmasin. Terakhir daerah yang termasuk ke dalam kriteria tidak efisien adalah Kabupaten Kotabaru dan Hulu Sungai Tengah.

Rasio Aktivitas (Keserasian)

Rasio aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja daerah secara optimal.

Tabel 13
Perhitungan Rasio Belanja Operasi dan Belanja Daerah
Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, 2012-2021

Kabupaten/Kota	Belanja Operasi (%)	Belanja Daerah (%)
Tanah Laut	48,42	51,58
Kotabaru	46,80	53,20
Banjar	56,94	43,06
Barito Kuala	56,63	43,37
Tapin	46,30	53,70
Hulu Sungai Selatan	60,10	39,90
Hulu Sungai Tengah	52,00	48,00

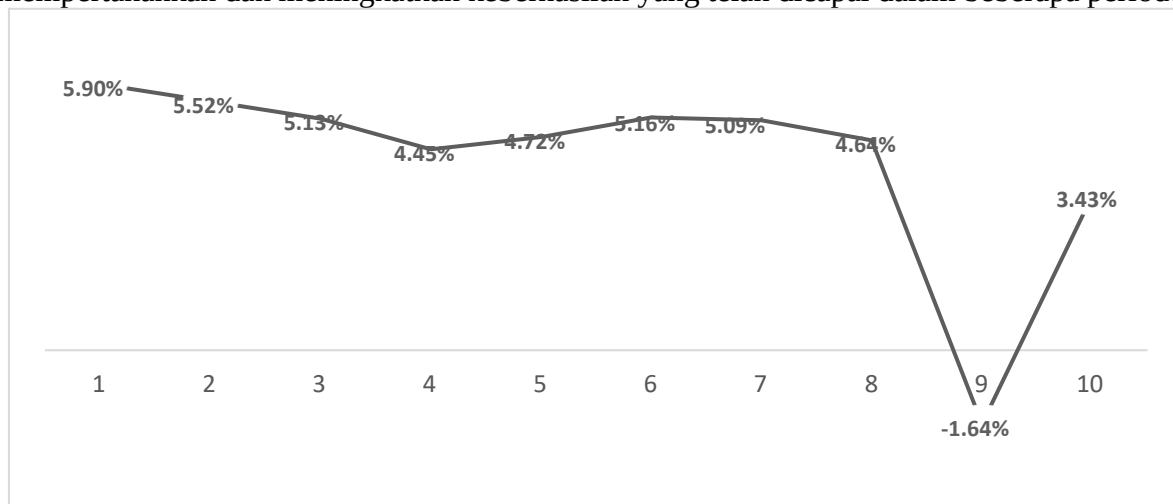
Kabupaten/Kota	Belanja Operasi (%)	Belanja Daerah (%)
Hulu Sungai Utara	55,32	44,68
Tabalong	52,54	47,46
Tanah Bumbu	43,10	56,90
Balangan	46,32	53,68
Banjarmasin	49,70	50,30
Banjarbaru	39,59	60,41

Sumber: Data diolah.

Jika dilihat dari komposisi bagian pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa belanja daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan lebih besar pada belanja operasi yang sifatnya rutin dan berulang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Dapat disimpulkan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan lebih memprioritaskan belanjanya pada belanja rutin dibandingkan untuk belanja investasi (pembangunan).

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dalam beberapa periode.



Gambar 1. Rasio Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012-2021

Sumber: Gambar diolah

Berdasarkan gambar di atas hasil perhitungan rasio pertumbuhan ekonomi 13 Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan selama 10 tahun dari tahun 2012-2021 secara rata-rata menunjukkan bahwa semua Kabupaten dan Kota dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang positif dengan tren yang berfluktuasi walaupun pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan sebesar -1,64% dikarenakan pada tahun 2020 semua daerah terdampak COVID-19.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh PAD Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel PAD > 0,05 yang menunjukkan bahwa PAD tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan studi tersebut tidak mendukung teori dasar yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah secara signifikan Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Artinya perolehan kekayaan berupa PAD tidak dioptimalkan oleh pemerintah sehingga dalam pelaksanaan otonomi daerah belum mampu untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Mulia Andirfa et al (2016) yang menemukan bahwa PAD secara parsial tidak

berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan setiap perubahan variabel PAD secara statistik tidak berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengujian hipotesis kedua menghasilkan dampak negatif yang cukup besar dari perimbangan dana terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dengan nilai koefisien $-0,05$ dan tingkat signifikansi $< 0,05$. Temuan penelitian mendukung hipotesis yang dikembangkan, bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan dirugikan secara signifikan oleh dana perimbangan. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran pemerintah daerah untuk memenuhi tuntutan akan menyusut semakin tinggi pembayaran perimbangan yang diterimanya dari pemerintah pusat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andjarwati (2021) yang menemukan bahwa dana perimbangan berdampak merugikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dikarenakan defisit akan muncul jika belanja daerah benar-benar melebihi pendapatan daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengujian hipotesis ketiga menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai signifikansi dalam pengujian secara simultan memiliki nilai $Sig\ 0,001 < 0,05$ dan nilai F-hitung yang diperoleh sebesar 7,712 dan F-tabel sebesar 3,07 yang artinya $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$. Temuan penelitian ini mendukung hipotesis yang dikembangkan, yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah secara simultan. Penelitian ini mendukung hasil penelitian Budiana dan Rahayu (2021) yang menyatakan bahwa semua variabel secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Rasio Keuangan

Berdasarkan hasil analisis beberapa rasio keuangan yang ada pada bab sebelumnya maka dapat diperoleh hasil bahwa hampir sebagian besar hasil analisis rasio keuangan seperti rasio desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan daerah, efektivitas, efisiensi, aktivitas dan pertumbuhan keuangan daerah berada pada kategori kurang atau rendah. Karena berbagai jenis pajak cenderung sangat berharga bagi pemerintah pusat, daerah yang masuk dalam kategori sangat kurang atau sangat rendah kehilangan pendapatan dari industri penting ini. Sehingga hanya pajak hotel dan restoran yang dapat diantisipasi menjadi pendapatan pemerintah daerah.

Untuk daerah yang berada pada kategori kurang juga disebabkan oleh hal yang sama namun karena daerahnya masuk ke dalam wilayah perkotaan maka lebih banyak terdapat industri sehingga memungkinkan pajak yang dikenakan terhadap industri lebih banyak daripada yang ada di daerah yang bukan perkotaan. Selain itu, ketiadaan BUMD sebagai sumber pendapatan daerah turut menyebabkan ketimpangan yang berkembang di sejumlah kabupaten. Terdapat unit usaha di setiap daerah yang dimiliki baik seluruhnya maupun sebagian oleh pemerintah daerah, sehingga sudah seharusnya pemerintah daerah mampu mengembangkan BUMD ini agar dapat menjadi sumber pemasukan dan bisa membantu daerah menjadi lebih mandiri. Dalam hal ini pemerintah daerah tidak bisa bergerak sendiri, diperlukan bantuan dari pihak lain khususnya pihak swasta sehingga bisa tercapai hasil yang lebih optimal.

Penyebab lainnya yaitu dana yang dimiliki pemerintah daerah nyatanya tidak semuanya diorientasikan untuk pembangunan daerah hal ini terlihat pada persentase rasio aktivitas belanja operasi lebih besar daripada belanja modal artinya pemerintah lebih mengutamakan belanja rutin daripada belanja investasi (pembangunan). Sehingga pembangunan yang akan dilakukan hanya menggantungkan bantuan dana dari pusat sehingga tidak dapat berjalan dengan optimal.

Dari beberapa pemaparan di atas dapat dinilai bahwa kinerja keuangan pemerintahnya belum cukup baik namun masih bisa dioptimalkan sehingga diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan dapat selalu meningkatkan pendapatan asli daerahnya dengan cara mengoptimalkan berbagai macam potensi yang dimiliki dan tidak terlalu bergantung dengan bantuan dari pemerintah pusat sehingga kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

PENUTUP

Kesimpulan pada penelitian ini ialah pertama, Pendapatan Asli Daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Kedua, dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Ketiga, kinerja keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan (bersamaan). Keempat, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan kinerja keuangan pemerintahnya belum cukup baik karena sebagian besar rasio keuangan berada pada kategori rendah artinya pemerintah daerah masih belum mampu mengurangi tingkat ketergantungan terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh penelitian terdahulunya (Tri Andjarwati, Endah Budiarti, Pramita Studiviany Soemadijo & Muhammad Yasin, 2021) yang menyatakan bahwa peningkatan PAD yang diterima oleh beberapa Kabupaten dan Kota di Jawa Timur tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan sedangkan dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Implikasi dalam hasil riset ini ialah implikasi praktis berkaitan dengan kontribusi penelitian terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan guna meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan hasil penelitian yang didapatkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pertimbangan agar pemerintah dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya dan menurunkan ketergantungan pada dana perimbangan. Keterbatasan Penelitian pada hasil riset ini ialah pertama, adanya keterbatasan waktu penelitian, tenaga dan kemampuan peneliti. Kedua, karena penelitian ini menggunakan data sekunder, peneliti tidak dapat mengatur dan mengawasi potensi kesalahan perhitungan. Ketiga, hanya menggunakan rasio aktivitas belanja operasi sebagai indikator penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah. Keempat, keterbatasan dalam mengambil variabel bebas pada penelitian, peneliti hanya menggunakan dua variabel yaitu PAD dan dana perimbangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminellia, D. P. C., & Muzdalifah. (2016). Peranan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan dan Kesenjangan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 6(1), 171–180.
- Andirfa, M., Hasan Basri, & M. Shabri A. Majid. (2016). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 5(3), 30–38.
- Andjarwati, T., Budiarti, E., Soemadijo, P. S., & Yasin, M. (2021). Analysis of local own revenue and balancing funds on the financial performance. *International Journal of Economics and Finance Studies*, 13(1), 235–250.
- Anggrayani, R., & Imansyah, M. H. (2020). Mengapa Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- Kabupaten/Kota Relatif Rendah? *Malaysian Palm Oil Council (MPOC)*, 5(2), 790–803.
<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203><http://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>
- Boedi, S. (2016). Analisis Kinerja Keuangan pada APBD Pemerintah Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. *JURNAL ILMIAH BISNIS dan KEUANGAN*, 2(2).
- Bolen, K. K. (2019). The effect of financial performance and balanced funds on capital expenditure of local government in district/city in Indonesia. *Journal of Public Administration and Governance*, 9(4), 129.
- Budiana, R., & Rahayu, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2020). *EProceedings of Management*, 8(6).
- Fahmi, I. (2012). *Analisis kinerja keuangan: panduan bagi akademisi, manajer, dan investor untuk menilai dan menganalisis bisnis dari aspek keuangan*.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Hapsa, S. D., & Saipudin. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah di Kota Banjarmasin. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(2), 346–361.
- Hariyadi, M. D., & Pahlevi, K. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kabupaten. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 6(1), 327–336.
- Kuncoro, M. (2018). *Perencanaan Pembangunan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI.
- Mokodompit, P. S., Pangemanan, S. S., & Elim, I. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2).
- Monica, F., & Sa'roni, C. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2019). *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(2), 819–833.
<https://doi.org/10.20527/jiep.v5i2.7031>
- Mustafa, B., & Halim, A. (2009). Pengukuran kinerja dinas pendapatan daerah provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 7(4), 792–802.
- Nawal, & Yunani, A. (2023). Analisis Indeks Kemandirian Desa Kabupaten Banjar. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 6(1), 1–8.
- Prasetyo, A., & Rahayu, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Bagi Hasil (Dbh), Dan Fiscal Stress Terhadap Tingkat Kemandirian Di Provinsi Kalimantan Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(4), 872–881. <https://doi.org/10.20527/jiep.v2i4.1222>
- Riani, D., & Hrp, J. P. R. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah, leverage, ukuran pemerintahan, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintahan daerah

-
- pada Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Audit Dan Perpajakan Indonesia (JAAPI)*, 3(1), 311–317.
- Rosemary O Ananazodo, Igbokwe-Ibeto, Chinyeaka Justine, & Nkomah, B. B. (2016). Local Government Financial Autonomy: A Comparative Analysis of Nigeria and Brazil. *Arabian Journal of Business and Management Review*, 5(10), 38–54.
- Sahara, G. F., & Muzdalifah. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2013-2017. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(3), 789–803.
- Sumarsono, S. (2010). *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Graha Ilmu.
- Suranta, S., Perdana, H. D., & Syafiqurrahman, M. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Komparasi Propinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 111-124.
- Wardani, S., & Saleh, M. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Dan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015- 2018. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 3(2), 407–420.